



POHON KINERJA DAN CROSSCUTTING TAHUN 2025-2029 DISNAKERTRANS PROVINSI SUMATERA SELATAN



POHON KINERJA

Pohon Kinerja merupakan instrumen analitis yang digunakan untuk mengawal struktur logika sebab-akibat dalam menjabarkan kondisi-kondisi yang diperlukan organisasi untuk mencapai hasil (*outcome*) yang diinginkan. Alat bantu ini mengadopsi model logis untuk memetakan rute pencapaian kinerja secara berjenjang, mulai dari tingkat strategis, taktis, hingga operasional.

Dalam penyusunan pohon kinerja tersebut, diidentifikasi pula aspek **crosscutting**, yaitu kolaborasi lintas sektor yang menggambarkan irisan program dan kontribusi kinerja antarunit kerja maupun instansi eksternal yang saling terkait dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan kedua konsep ini secara terintegrasi bertujuan untuk mendorong perencanaan yang kolaboratif, holistik, dan berorientasi pada hasil, guna memastikan penggunaan sumber daya negara dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. LANDASAN STRATEGIS DAN VISI-MISI

Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibangun di atas visi "**Sumsel Maju Terus Untuk Semua**".

Secara spesifik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung **Misi ke-5** tentang perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Pencapaian ini dijabarkan melalui tujuan RPJMD untuk meningkatkan daya saing, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. STRUKTUR POHON KINERJA (SASARAN STRATEGIS)

Dalam dokumen perencanaan tersebut, kontribusi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi diukur melalui Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya tingkat kesempatan kerja;
2. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja;
3. Terciptanya pemantapan Transmigran

3. ANALISIS CROSSCUTTING: KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Pencapaian target-target di atas tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, melainkan membutuhkan **Crosscutting** atau kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal. Dua program unggulan yang menggambarkan sinergi ini adalah:

Aktor crosscutting yang terlibat meliputi:

- **Regulator:** **Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Transmigrasi RI** berperan menetapkan kebijakan nasional,

sementara **Kanwil Kemenkumham** memfasilitasi legalitas.

Bappeda bertugas mengintegrasikan program ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas.

- **Fasilitator:** **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** bertindak sebagai pemimpin koordinasi dan pembinaan.
- **Internal:** Berbagai dinas teknis yang berkontribusi dan terkait
- **Akademisi/Perguruan Tinggi** memberikan penguatan kapasitas SDM.
- **Perbankan** menyediakan akses pembiayaan

Keberhasilan kolaborasi lintas sektor ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Produktivitas, Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak hak Dasarnya, Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi.

Dengan struktur Leading Sektor yang berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seluruh aktor pendukung bergerak dalam satu harmoni untuk memastikan Tingkat Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkat.

4. KESIMPULAN

Integrasi antara Pohon Kinerja yang logis dengan pemetaan Crosscutting bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral. Dengan narasinya yang terstruktur, setiap unit kerja memahami bahwa keberhasilan indikator makro, seperti **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** sangat bergantung pada dukungan berbagai stakeholder yang dikawal bersama oleh berbagai aktor dalam ekosistem pemerintahan.

Visi dan Misi RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2025-2029



Visi

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

“Sumsel sebagai Provinsi yang Maju Ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantra. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil”

“Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Petumbuhan Ekonomi yang tinggi seimbang dengan Pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata Kelola yang baik”



“Untuk mencapai Visi, ditempuh dengan

7 Misi



1

Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.



2

Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.



3

Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.



4

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.



5

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.



6

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.



7

Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi mendukung Misi (5), yaitu:

“Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga untuk Menurunkan Angka Kemiskinan”.

Tujuan, Sasaran RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029



MISI 5

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

TUJUAN RPJMD

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat

INDIKATOR RPJMD

Tingkat Kemiskinan (%) Rasio Gini (Indeks)

SASARAN RPJMD

- 1. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berusaha**
2. Meningkatkan Upaya Perlindungan Sosial

PROGRAM MISI V

- a) Mendorong ketersediaan kesempatan kerja yang merata di Sumatera Selatan.**
- b) Meningkatkan kualitas tenaga pendamping pertanian yang merata guna memperkuat GSMP.
- c) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam melahirkan sociopreneur dari generasi z dan generasi milenial.
- d) Mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah.**
- e) Mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro, dukungan akses permodalan usaha, kemudahan perizinan usaha, fasilitasi pengembangan produk, teknologi produksi, kemasan produk dan akses pasar bagi UMKM.

TUJUAN RENSTRA:

Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

SASARAN RENSTRA:

1. Meningkatkan tingkat kesempatan kerja;
2. Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja;
3. Terciptanya pemantapan Transmigran

OUTCOME:

1. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja
2. Terkelolanya Informasi Pasar Kerja
3. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Pekerja Indonesia yang Terlindungi
5. Terlindunginya Hak Hak Pekerja
6. Meningkatkan Pelaksanaan Transmigrasi
7. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi

Tujuan RENSTRA

Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator :

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran RENSTRA

1. Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja

Indikator :

- Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri
- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
- Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
2. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja dan Informasi Pasar Kerja

Crosscutting :

- Internal : Bappeda, Dinas Pendidikan DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dispora, Dinas Perindustrian, Biro Perencanaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UKM
- Eksternal : Kemenaker, POLDA, Kemenhumham, Imigrasi, BIN, BP3MI, Perbankan

2. Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Kerja

Indikator :

- Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya
- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kondisi hubungan kerja yang kondusif;
2. Penegakan hukum ketenagakerjaan;

Crosscutting :

- Internal: Dinas PPPA, - Eksternal : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, APINDO, Akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, Pengadilan Hubungan Industrial, Asosiasi PJK3, POLDA, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Hubungan Industrial, PTUN

3. Terciptanya Pemantapan Transmigran

Indikator :

Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan pelaksanaan transmigran;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi;

Crosscutting :

- Internal : Dinas PU BM Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
- Eksternal : Kementerian Transmigrasi, BPN, POLDA

Note :

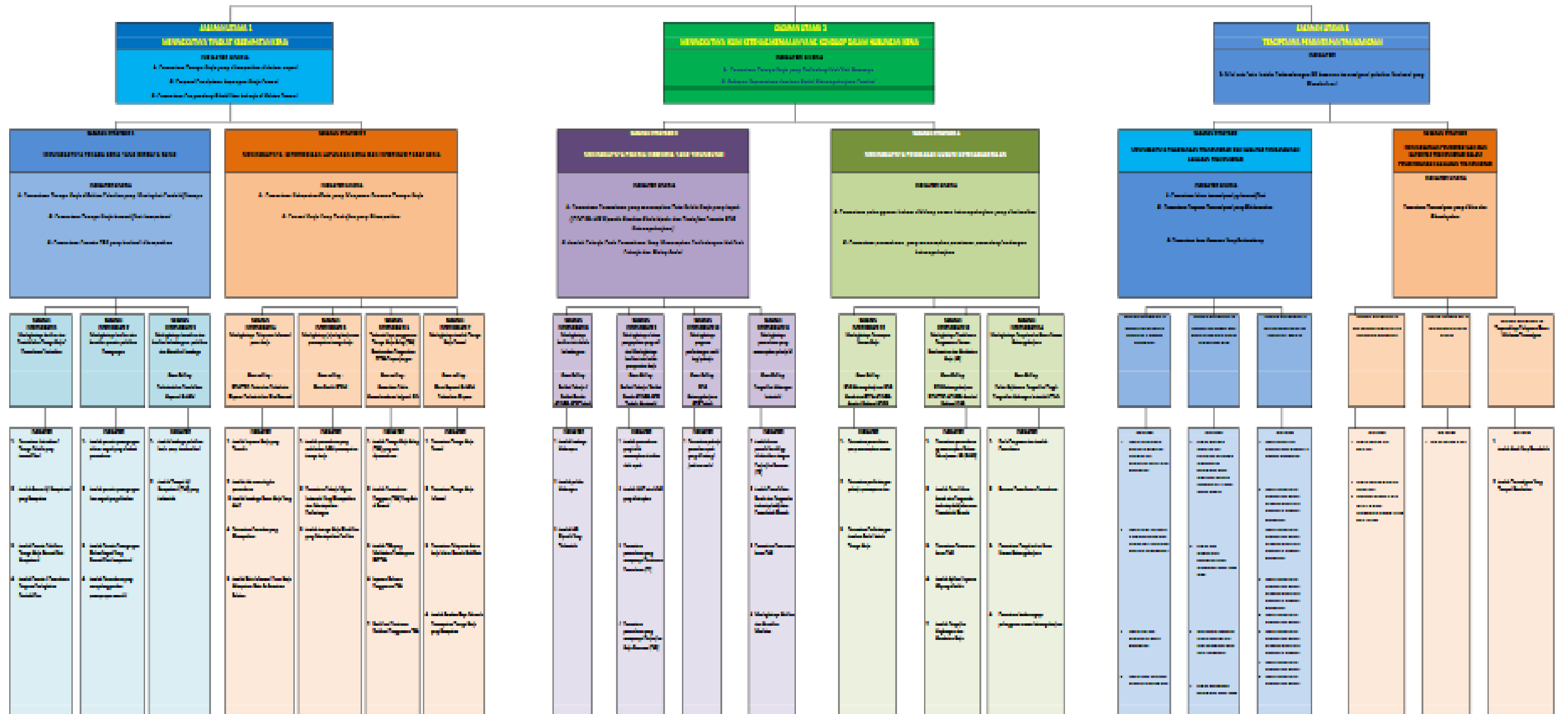
Internal : OPD Terkait sesama Pemerintah Provinsi Sumsel

Eksternal : Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Organisasi, dan stakeholder lain diluar Pemerintah Provinsi Sumsel

TEMA 1
ADMINISTRASI KEMEROPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DAFTAR ISI

1. **Topik Penelitian Empiris Anda (PRA)**
2. **Topik Penelitian Teoritis/Program Anda**



Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Urusan :
- Tenaga Kerja
- Transmigrasi

Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Fungsi :
a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas kabupaten/Kota
c. Pembinaan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas
f. Penetapan Jaminan Kesejahteraan Purna Kerja dan Tenaga Asing
g. Penetapan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum
h. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
i. Penelitian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan Tugas dan Fungsinya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas)	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Berita Resmi Statistik (BRS)	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	Pengukuran perbandingan antara jumlah hasil kerja (output) dengan jumlah masukan (input) dalam kurun waktu tertentu	$\frac{\text{PDRB Tahun Berjalan (ADHK)}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$	Berita Resmi Statistik (BRS)	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif Dalam Hubungan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	Rasio antara jumlah tenaga kerja yang seluruh hak dasarnya telah dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang dengan total tenaga kerja yang ada, dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan/ Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan/ Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
3.	Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	Index	Rata-rata nilai indeks Perkembangan (IP) dari 52 kawasan tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam program revitalisasi kawasan transmigrasi nasional	Rata-rata nilai indeks Perkembangan (IP) dari 52 kawasan tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam program revitalisasi kawasan transmigrasi nasional	Kementerian Transmigrasi	Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya/ Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

Palembang,

2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan

H. Indra Bangsawan, S.H., M.M
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197005091992031001